

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan terus bertambah setiap tahunnya. Permasalahan tentang keseimbangan perekonomian menjadi permasalahan utama yang harus dikaji secara terus-menerus oleh pemerintah demi terciptanya pembangunan ekonomi yang merata. Pembangunan nasional merupakan suatu usaha peningkatan kualitas manusia secara berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan meratakan pendapatan masyarakat.

Beberapa tahun ini Indonesia mulai bergerak tumbuh dengan terciptanya berbagai industri baru dan pembangunan-pembangunan infrastuktur, yang mana hal tersebut dinilai dapat meningkatkan mobilisasi perekonomian. Selain itu, Indonesia juga perlahan mulai menata kondisinya, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin naik. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan dalam menilai kinerja ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi yang optimal menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat ditandai dengan kenaikan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menjadi ciri dari optimalisasi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makroekonomi jangka panjang. Disetiap periode suatu masyarakat akan meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi yang berlaku. Berbagai negara tidak selalu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan kemampuan memproduksi yang dimiliki oleh faktor - faktor produksi yang semakin meningkat. Dibanyak negara kerap kali didapati keadaan dimana pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya adalah jauh lebih rendah dari potensi pertumbuhan yang dapat dicapai.¹

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kelesuan ekonomi yang terjadi pada suatu negara, campur tangan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting karena mampu mengendalikan perekonomian dan mendorong semangat nasionalisme bertambah kuat, yang berarti kebijakan nasional mendapat perhatian lebih diutamakan untuk mewujudkan ekonomi nasional yang lebih kokoh dan kesejahteraan rakyat yang lebih tinggi.

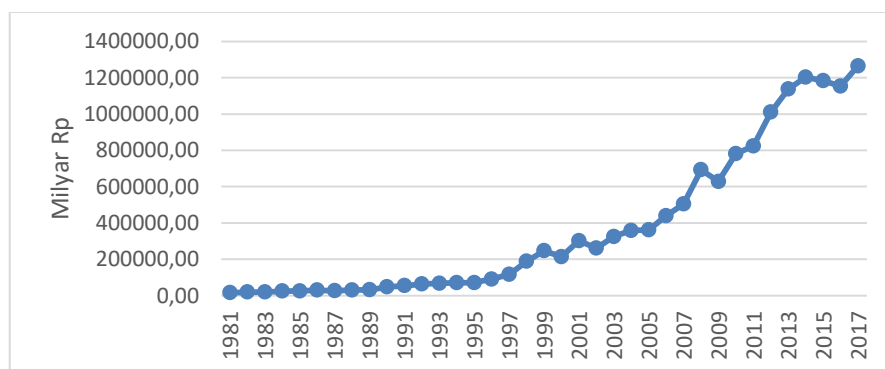
Peran pemerintah dibidang perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk peran pemerintah secara langsung yaitu dengan intervensi anggaran (*budget intervenstions*) melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan kebijakan perpajakan, kebijakan bukan pajak, kebijakan anggaran belanja negara maupun kebijakan pembiayaan

¹ Sadono sukirno, *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Hal. 13.

anggaran Intervensi tidak langsung dapat dilakukan melalui peraturan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah adalah salah satu variabel pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) selain dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan sektor bisnis untuk barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa (G) dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor (X-M). Secara matematis dapat dirumuskan: $Y = C + I + G + (X-M)$.

Gambar 1.1
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1981 – 2017



Sumber : Bank Dunia dan Nota Keuangan APBN, 2019 (Data diolah)

Grafik diatas memuat tentang jumlah pengeluaran pemerintah pusat secara rutin dan pengeluaran yang digunakan pembangunan dimana dari tahun 1981 yaitu sebesar 16207,20 milyar rupiah sampai dengan 2017 sebesar 126535,93 milyar rupiah. Pengeluaran pemerintah yang dilakukan secara rutin dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,

pembiayaan bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan untuk pembiayaan pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek.

Menurut Rahayu kebijakan fiskalnya pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasionalnya melalui target peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto). Selain itu menurut Due dalam bukunya Rahayu menyatakan bahwa Program-program pengeluaran serta pembiayaan akan dapat mempengaruhi tingkat pencapaian *full-employment* dengan mengubah pengeluaran total dalam perekonomian dan karenanya mengubah GNP (*Gross National Product*).²

Namun dalam realita yang terjadi, perbedaan pengeluaran pemerintah timbul karena adanya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat yaitu tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.³

Selain dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, yang menjadi pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi yaitu terjadinya inflasi. Inflasi

² Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hal. 213.

³ Azwar, Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.20, No.2, Agustus 2016, Hal. 155.

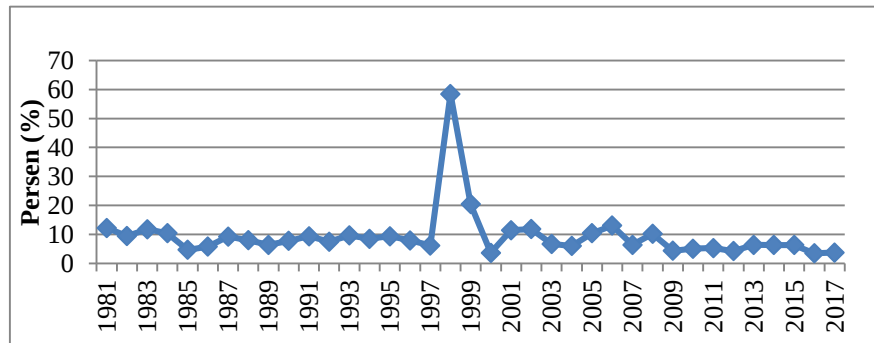
merupakan masalah yang banyak disoroti pemerintah Indonesia maupun negara lain, karena menjadi permasalahan utama dalam perekonomian. Salah satu akibat dari inflasi adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi. inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno, tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi nol persen bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, karena ia adalah sukar dicapai, yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah.⁴

Inflasi yang tinggi mengakibatkan investasi produktif akan berkurang, tingkat kegiatan ekonomi menurun, semakin banyaknya pengangguran, produk dalam negeri tidak dapat bersaing di pasar internasional, impor meningkat, dan kedudukan neraca pembayaran akan memburuk. Dengan kondisi yang seperti secara tidak langsung negara akan semakin tergerus, sehingga pemerintah harus selalu tanggap dengan adanya perubahan inflasi dan juga harus segera menekan inflasi apabila mengalami kenaikan.

⁴ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar :Edisi Ketiga*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), Hal. 333.

Gambar 1.2
Inflasi Indonesia Tahun 1981 – 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

Pada grafik 1.2 ini terlihat bahwasanya Indonesia mengalami inflasi yang sangat fluktuatif. Sangat nampak dengan jelas bahwa kenaikan inflasi selama kurun waktu 37 tahun terakhir dilihat dari grafik yang ada, puncak tertinggi inflasi terjadi pada tahun 1998, dimana pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Harga barang-barang yang ada di Indonesia mengalami kenaikan.

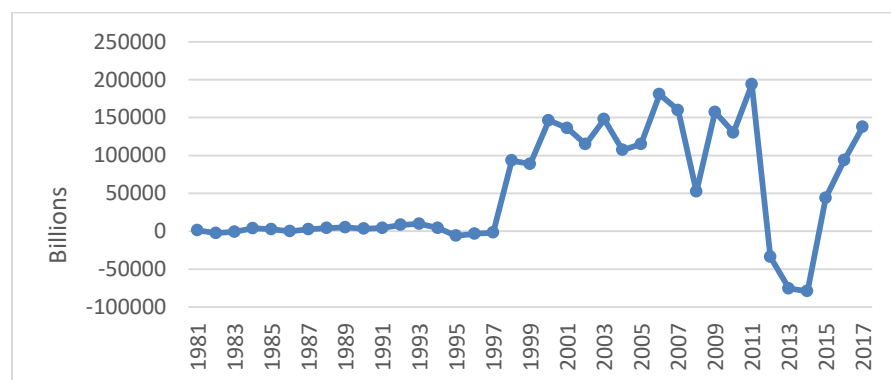
Penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Sulasmiyati menemukan hasil bahwasannya inflasi mempunyai dampak secara parsial negative signifikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Inflasi bertindak sebagai faktor yang dapat menjelaskan perubahan Produk Domestik Bruto secara parsial.⁵

Perdagangan internasional dalam kaitan mendongkrak pertumbuhan ekonomi ternyata juga mempunyai pengaruh yang sangat penting juga. Semakin meningkatnya ekspor suatu negara, pendapatan masyarakat akan

⁵ Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati, Pengaruh Inflasi, Ekspor, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Studi Pada Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand), *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.63, No.1, Oktober 2018, Hal. 7.

meningkat pula. Namun demikian, di era perekonomian terbuka saat ini maka pada saat bersamaan pula arus impor juga akan meningkat yang dimana dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya nilai impor akan berdampak terhadap penurunan PDB.⁶

Gambar 1.3
Neraca Perdagangan



Sumber : Bank Dunia, 2019 (data diolah)

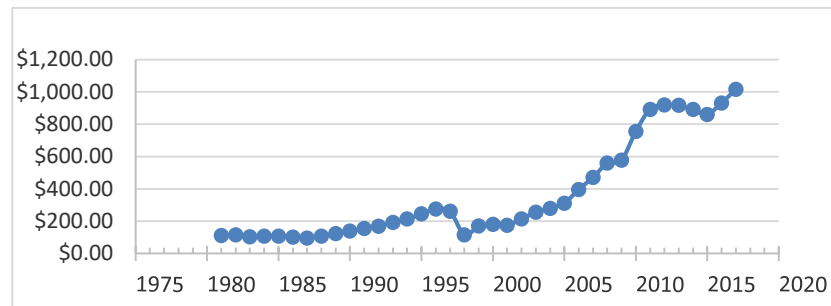
Gambar grafik diatas menunjukkan selisih antara jumlah ekspor barang dan jasa dengan jumlah impor barang dan jasa di Indonesia selama periode 1981 sampai 2017. Biasanya neraca perdagangan ini disebut juga sebagai *exports netto*. Neraca perdagangan dikatakan defisit apabila nilai ekspor lebih kecil dari impornya dan dikatakan surplus apabila ekspor lebih besar dari impornya.

Salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi disuatu negara adalah dengan melihat jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dengan demikian angka yang digunakan untuk menaksir perubahan *output*

⁶ Sulthon Sjahril Sabaruddin, Dampak Perdagangan Internasional Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Aplikasi *Structural Path Analysis*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17, No. 4, April 2015, Hal. 434.

adalah nilai moneter (uang) yang tercermin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Gambar 1.4
GDP (Gross Domestic Product)



Sumber: IMF (*International Monetary Found*), 2019

Pada grafik 1.4 diatas menunjukkan keadaan GDP di Indonesia selama kurun 37 tahun, yaitu dari tahun 1981 sampai 2017. Dari grafik sangat terlihat sekali bahwa penurunan nilai GDP yang paling paling mencemaskan yaitu pada tahun 1998, yang mana pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi sehingga nilai GDP pada tahun itu turun dari 260 ke 115 US\$.

Menurut Prathama dan Manurung rakyat dikatakan makin sejahtera jika setidaknya *output* per kapita meningkat. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan PDB per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera masyarakat. Agar PDB per kapita meningkat, maka perekonomian harus terus bertumbuh dan harus lebih tinggi dari pada tingkat pertambahan penduduk. Jika pertambahan penduduk suatu negara

adalah 2% pertahun, maka pertumbuhan PDB harus lebih besar dari 2% per tahun.⁷

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi dan neraca perdagangan terhadap GDP (*Gross National Product*) Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi GDP, seperti penelitian yang dilakukan azwar bahwasanya pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, namun berbeda dengan asumsi wagner bahwa suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Irene Sarah Larasati dan Sri Sulasmiyati membuat kesimpulan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang negatif signifikan terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Berlian Karlina yang menyatakan bahwa tingkat inflasi memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan PDB.

Hasil penelitian tentang neraca perdagangan menurut Muhammad Bobby Fadhilah menyatakan bahwa neraca perdagangan/ekspor neto memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB karena pada tahun tertentu adanya defisit ekspor.

⁷ Rahardja Prathama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro: Suatu Pengantar Edisi Kelima*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), Hal. 145.

Berdasarkan permasalahan tersebut dan juga rekomendasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati yang berjudul Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional dan Utang luar Negeri Terhadap *Gross Domestic Product* Indonesia (Periode 1990-2010) untuk menambah variabel yang sudah ditentukan dan menambah periode penelitian, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Neraca Perdagangan Terhadap *Gross National Product* di Indonesia”** dengan periode dari tahun 1981 - 2017.

B. Identifikasi Masalah

1. Pengeluaran pemerintah pusat selama tahun 1981 sampai tahun 2017 mengalami fluktuatif tergantung dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Terutama terpengaruh terhadap inflasi. Jika inflasi naik maka pengeluaran pemerintah harus di atur dengan baik, karena mengakibatkan ketidak seimbangan dalam perekonomian
2. Inflasi mengalami penurunan dan kenaikan setiap waktu dan berdampak pada harga barang yang yang tidak stabil. Namun jika inflasi dapat diprediksi dengan baik tidak akan terlalu mempengaruhi. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998.
3. Neraca perdagangan diperoleh dari selisih antara ekspor dan impor dari barang yang tampak dalam periode tertentu. Namun neraca perdagangan disini tidak terlalu akurat karena tidak bisa memprediksi apabila ada barang digelapkan.

4. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian disuatu negara dalam suatu periode tertentu. PDB didasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh neraca perdagangan terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, inflasi dan neraca perdagangan terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penulis bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sehingga dapat dicapai tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh antara pengeluaran pemerintah terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia.

2. Untuk menguji pengaruh antara inflasi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh antara neraca perdagangan terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh antara pengeluaran pemerintah, inflasi dan neraca perdagangan terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai media pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia perekonomian yang bisa dijadikan tolak ukur dan perbandingan dalam melakukan penelitian maupun peningkatan keilmuan yang semakin lama mengalami perkembangan yang pesat. Semoga penelitian ini juga bisa digunakan rujukan atau referensi dan tambahan pustaka di IAIN Tulungagung.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Peneliti

Melatih ketajaman dalam menganalisis dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan tentang permasalahan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. dan juga bisa digunakan untuk referensi dalam penelitian yang sejenis.

b. Bagi masyarakat

Memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang peran serta pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pendapatan masyarakat dengan berbagai intervensi seperti menggunakan kebijakan fiskal.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang mempermudah pelaksanaan suatu penelitian supaya lebih efektif dan efisien. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah (X1), inflasi (X2) dan neraca perdagangan (X3). Sedangkan untuk variabel terikatnya adalah *Gross Domestic Product* (Y).

2. Keterbatasan Masalah

Batasan masalah dalam suatu penelitian bertujuan untuk menghindari tidak terkendalinya bahasan suatu masalah yang mengakibatkan pembahasan akan semakin melebar dan tidak terfokus pada tema yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan data pengeluaran pemerintah yang terfokuskan di belanja pemerintah pusat yaitu penjumlahan antara pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang diperoleh dari data Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data inflasi diperoleh dari BPS dan World Bank sedangkan neraca perdagangan diperoleh dari selisih antara ekspor dan impor. Periode yang digunakan dari semua variabel adalah tahunan yaitu dari tahun 1981 – 2017.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a. Pengeluaran pemerintah (*Goverenment Expenditures*) tercermin dalam APBN termasuk Belanja Negara yang berarti kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa⁸
- b. Inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang dipasar. Dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit.⁹
- c. Neraca perdagangan yaitu perbedaan antara ekspor dan impor dari perdagangan tampak yaitu perdagangan dalam barang-barang tampak. Apabila nilai neraca itu positif ia berarti bahwa ekspor barang-barang tampak adalah melebihi impornya, begitu sebaliknya.¹⁰
- d. *Gross Domestic Product* (GDP) yang biasa disebut Produk Domestik Bruto (PDB) di definisikan sebagai produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara. PDB merupakan salah satu ukuran mengenai

⁸ Bank Indonesia, *Meta Data : Operasi Keuangan Pemerintah Pusat*, dalam www.bi.go.id diakses pada 22 Mei 2019 pukul 21.10 wib.

⁹ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 175.

¹⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Hal. 391.

besarnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.¹¹

2. Definisi Operasional

- a. Pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa, untuk gaji pegawai, dan untuk *transfer payment* yaitu pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dari persamaan diatas dapat diamati bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi pendapatan nasional.

- b. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum dari barang dan jasa secara terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain.

$$\text{Rumus: Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_o}{IHK_o} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_n :Indeks Harga Konsumen pada tahun n.

¹¹ Ibid, Hal. 17.

IHK₀ :Indeks Harga Konsumen pada dasar atau tahun sebelumnya.

- c. Neraca perdagangan yaitu selisih atau ekspor dikurangi impor dalam suatu periode tertentu. Neraca perdagangan dikatakan defisit apabila nilai ekspor lebih kecil dari impornya dan dikatakan surplus apabila ekspor lebih besar dari impornya. Dalam rumus neraca perdagangan disimbolkan dengan huruf (T), secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$T = P.X - e P^*M$$

Dimana T menyatakan neraca perdagangan, X menyatakan ekspor dan M menyatakan jumlah barang yang diimpor. Sedangkan P menyatakan harga dari barang domestic, P* adalah barang luar negeri, e adalah nilai tukar nominal.

- d. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang yang diproduksi oleh sebuah negara dan dalam priode tertentu. produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Rumus perhitungan PDB pendekatan produksi adalah:

$$Y = (PXQ)_1 + (PXQ)_2 +(PXQ)_n$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Nasional

Q = kuantitas

P = harga

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara isi dari sisi skripsi, yaitu suatu gambaran analisis skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan suatu arahan bagi pembaca untuk menelaah secara urutan terdapat tiga bagian dalam sistematika penulisan skripsi yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pedoman skripsi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Tulungagung. Untuk mempermudah pemahaman, maka penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan buku pedoman skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

- BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengukuran dan instrument penelitian, serta teknik analisis data
- BAB IV Hasil penelitian. Terdiri dari deskripsi data, analisis data dan uji hipotesis.
- BAB V Pembahasan, yang diorientasikan untuk menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori – teori yang sudah ada, memodifikasi teori yang ada atau menyusun teori baru
- BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.